

**ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH, INTEGRASI SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN MULTIKULTURAL DI PULAU SULAWESI DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI, EKONOMI, DAN TATA WILAYAH MARITIM**

**Dinda Parasnalurita<sup>1</sup>, Mawaddah R<sup>2</sup>, Reva Rahmadani<sup>3</sup>, Abdul Malik<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[dindaparasnalurita@gmail.com](mailto:dindaparasnalurita@gmail.com), [mawaddahr75@gmail.com](mailto:mawaddahr75@gmail.com), [revarahmadani74@gmail.com](mailto:revarahmadani74@gmail.com)  
[almalikizza@gmail.com](mailto:almalikizza@gmail.com)

**Abstract**

Sulawesi is a land rich in cultural diversity, natural beauty, and vibrant communities. Yet, behind its promise lies the reality of uneven development, fragile social bonds, and limited space for education that embraces diversity. This article weaves together insights from five studies that explore Sulawesi's challenges through anthropological, economic, and spatial lenses. Regional inequality continues to create gaps in opportunity, while the lack of intercultural understanding makes coexistence more difficult. Multicultural education, meant to build bridges, has not yet fully reached those who need it most. This study calls for rebuilding social connection through empathetic policies, heartfelt education, and the nurturing of local wisdom. What Sulawesi needs is not just infrastructure, but a humane, inclusive vision of development that honors the people and stories that shape its identity.

Keywords : Sulawesi, inequality, diversity, social integration, multicultural education

**Abstrak**

Pulau Sulawesi adalah rumah bagi keragaman budaya, potensi alam, dan dinamika sosial yang luar biasa. Namun, di balik kekayaan itu, masih tersimpan persoalan ketimpangan pembangunan, lemahnya integrasi sosial, dan kurangnya ruang bagi pendidikan yang merangkul perbedaan. Artikel ini merangkum lima kajian yang menyoroti wajah Sulawesi dari berbagai sudut: antropologi, ekonomi, hingga tata ruang maritim. Ketimpangan antar wilayah menciptakan jurang kesempatan; sementara pemahaman antar budaya yang belum terbangun dengan kuat menyulitkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis. Pendidikan multikultural, yang seharusnya menjadi jembatan, belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan masyarakat majemuk. Kajian ini menyerukan pentingnya membangun kembali hubungan sosial melalui kebijakan yang berpihak, pendidikan yang menyentuh nurani, dan kearifan lokal yang dirawat bersama. Sulawesi tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga rekatan sosial yang manusiawi dan inklusif.

Kata Kunci : Sulawesi, ketimpangan wilayah, keberagaman, integrasi sosial, pendidikan multicultural

## **PENDAHULUAN**

Pulau Sulawesi bukan sekadar entitas geografis di jantung Indonesia Timur, melainkan ruang hidup yang kaya akan nilai, budaya, dan sejarah masyarakatnya. Namun, di balik keragaman dan potensinya yang besar, Sulawesi menghadapi kenyataan yang kontras: ketimpangan wilayah yang terus melebar. Seperti yang diungkapkan oleh Jinca (2021), “pembangunan wilayah maritim masih terfokus di kawasan tertentu saja, menyebabkan akses dan konektivitas wilayah lain menjadi terhambat.” Ketimpangan ini menjauhkan sebagian masyarakat dari akses ekonomi dan layanan dasar, membuat mereka menjadi penonton dari narasi pembangunan yang tidak menyentuh akar kehidupan mereka.

Pulau Sulawesi bukan sekadar entitas geografis di jantung Indonesia Timur, melainkan ruang hidup yang kaya akan nilai, budaya, dan sejarah masyarakatnya. Namun, di balik keragaman dan potensinya yang besar, Sulawesi menghadapi kenyataan yang kontras: ketimpangan wilayah yang terus melebar. Seperti yang diungkapkan oleh Jinca (2021), “pembangunan wilayah maritim masih terfokus di kawasan tertentu saja, menyebabkan akses dan konektivitas wilayah lain menjadi terhambat.” Ketimpangan ini menjauhkan sebagian masyarakat dari akses ekonomi dan layanan dasar, membuat mereka menjadi penonton dari narasi pembangunan yang tidak menyentuh akar kehidupan mereka.

Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Sulawesi, pendidikan memiliki peran vital untuk menumbuhkan kesadaran hidup bersama dalam perbedaan. Sayangnya, seperti dicatat dalam jurnal *Journal Manager* oleh tim UNJ (2020), “pendidikan multikultural masih dipahami sebatas konsep teoritis, belum menjadi praktik nyata di ruang kelas.” Banyak sekolah masih mengedepankan pendekatan homogen, tanpa membekali siswa dengan kecakapan sosial untuk memahami dan merayakan keberagaman. Akibatnya, potensi pendidikan sebagai perekat sosial belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Lebih lanjut, studi oleh Ima Kesuma (2021) menunjukkan bahwa integrasi sosial tidak bisa dibangun hanya lewat regulasi atau proyek jangka pendek. Ia menulis, “integrasi sosial hanya akan terwujud jika ada kesediaan mendengar, ruang untuk saling memahami, dan upaya untuk menjembatani ketimpangan secara inklusif.” Di Sulawesi, hal ini berarti mendekatkan pusat dan pinggiran—bukan hanya secara geografis, tetapi juga dalam pengakuan terhadap identitas dan pengalaman warga yang selama ini tersisih dari wacana utama pembangunan.

Berdasarkan lima kajian tersebut, tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa membangun Sulawesi berarti membangun ulang ikatan sosialnya—dengan cara yang lebih adil, berempati, dan berakar pada realitas lokal. Dengan menggabungkan perspektif antropologi, ekonomi, dan tata wilayah maritim, studi ini berusaha memahami keterkaitan antara ketimpangan wilayah, lemahnya integrasi sosial, dan belum optimalnya pendidikan multikultural. Seperti yang ditekankan dalam studi Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan (Nasruddin, 2021), “pembangunan yang tidak merata akan selalu menyisakan ketidakpuasan sosial yang sulit diredam.” Maka, mendorong transformasi yang manusiawi di Pulau Sulawesi bukan hanya tanggung jawab kebijakan, melainkan juga komitmen moral untuk tidak membiarkan siapa pun tertinggal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review, yakni telaah terhadap berbagai sumber ilmiah yang telah ada sebagai dasar pemahaman dan pembentukan sudut pandang yang utuh. Metode ini dipilih karena tidak hanya memberikan kerangka teoritik, tetapi juga menawarkan refleksi kritis dari berbagai temuan sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh Zed (2008), “literature review adalah uraian teoritis, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari referensi untuk dijadikan landasan dalam penelitian, agar tidak terputus dari konteks keilmuan sebelumnya.” Dengan kata lain, literature review adalah upaya untuk berdialog secara intelektual dengan pemikiran yang telah lahir lebih dulu.

Sumber data dikumpulkan melalui basis data Google Scholar, dengan pertimbangan aksesibilitas yang luas dan daya jangkau yang tinggi terhadap jurnal-jurnal akademik baik nasional maupun internasional. Fokus utama pencarian diarahkan pada kajian-kajian yang membahas Pulau Sulawesi—tidak hanya sebagai ruang geografis, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya. Peneliti menyadari bahwa memahami Sulawesi tidak cukup hanya dengan melihat peta atau angka statistik, tetapi juga mendengar suara masyarakatnya melalui tulisan-tulisan para peneliti terdahulu.

Dari hasil pencarian tersebut, diperoleh lima artikel jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria kelayakan tematik dan metodologis. Artikel-artikel tersebut menjadi bahan utama dalam menyusun kerangka analisis. Seperti diungkap dalam salah satu jurnal oleh Jinca (2021),

“pengelolaan ruang di kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, menuntut pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi sosial dan geografis lokal.” Kutipan ini memperkuat keyakinan bahwa studi pustaka bukan hanya soal membaca, tetapi juga tentang menafsirkan pengalaman masyarakat dari balik lembaran akademik.

Melalui metode ini, peneliti tidak sekadar menyusun ulang teori atau temuan, tetapi mencoba menghadirkannya kembali dengan cara yang lebih kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata. Sebab pada akhirnya, penelitian bukan hanya tentang menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang memperjuangkan suara mereka yang sering luput dari narasi besar pembangunan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi terlihat jelas dalam peta pembangunan yang timpang antara wilayah barat dan timur. Wilayah seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara berkembang pesat dengan infrastruktur dan fasilitas yang relatif lengkap, sementara wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masih tertinggal. Seperti disampaikan oleh Mujiburrahman (2021), “tingkat keterisolasian dan kesenjangan layanan publik di wilayah terpencil Sulawesi memperkuat marginalisasi sosial dan ekonomi masyarakatnya”. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada perasaan keadilan sosial dan kepercayaan terhadap negara.

Dalam perspektif antropologi, ketimpangan ini tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat. Sulawesi dihuni oleh berbagai etnis dengan sistem sosial yang unik, seperti masyarakat Bugis dengan prinsip siri’ dan pacce, serta masyarakat Toraja dengan tradisi adat yang kuat. Menurut penelitian Jinca (2020), “hubungan patron-klien yang masih dominan di masyarakat pesisir menyebabkan akses terhadap sumber daya kerap kali bersifat eksklusif”. Kondisi ini mempertegas bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan ekonomi semata, tetapi juga harus memahami cara masyarakat memaknai relasi kekuasaan dan sosial.

Meski beragam, masyarakat Sulawesi memiliki kekuatan sosial yang luar biasa dalam membangun integrasi. Pengalaman sejarah panjang sebagai wilayah perdagangan dan migrasi telah membentuk jaringan sosial yang cair namun tetap berakar pada identitas lokal. Dalam

jurnal dari UNJ disebutkan bahwa “pendidikan multikultural dapat menjadi jembatan antar-etnis di kawasan ini, jika difokuskan pada nilai lokal dan partisipasi aktif komunitas”. Dengan kata lain, membangun integrasi sosial tidak cukup hanya lewat proyek fisik, melainkan lewat pemulihan kepercayaan, komunikasi lintas budaya, dan partisipasi yang bermakna.

Pembangunan multikultural menjadi pendekatan yang strategis di tengah keragaman Sulawesi. Wilayah seperti Tana Toraja, yang menggabungkan adat dan pariwisata, membuktikan bahwa budaya bisa menjadi tulang punggung ekonomi yang inklusif. Namun demikian, pembangunan multikultural memerlukan sensitivitas terhadap hak-hak budaya minoritas, terutama dalam perencanaan tata ruang dan pendidikan. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Antropologi UGM, dikatakan bahwa “pembangunan yang tidak memperhatikan budaya lokal seringkali menimbulkan resistensi dan alienasi masyarakat adat”.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan antarwilayah terlihat pada pemusatan investasi di daerah kaya sumber daya seperti Morowali dan Bitung. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan masyarakat lokal belum selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi yang adil justru memperkuat jurang sosial. Seperti disampaikan oleh Wulandari & Haryono (2021), “penguasaan modal oleh korporasi luar seringkali meminggirkan komunitas lokal dari hasil pembangunan”. Keadilan ekonomi memerlukan intervensi aktif negara, bukan hanya membiarkan pasar bekerja sendiri.

Tata wilayah maritim juga menjadi elemen penting yang sering terabaikan dalam kebijakan pembangunan Sulawesi. Padahal, sebagian besar masyarakat hidup dari laut, dan konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada jalur laut. Dalam kajian oleh Jinca (2020), disebutkan bahwa “pengintegrasian sistem jaringan wilayah maritim dapat mempercepat pemerataan pembangunan jika diarahkan pada pusat-pusat pertumbuhan lokal yang berbasis masyarakat”. Maka, pembangunan harus bergerak dari darat ke laut, bukan sebaliknya, dengan mendengar suara nelayan, perempuan pesisir, dan masyarakat pulau kecil.

Dengan merangkai semua temuan tersebut, jelas bahwa pembangunan di Sulawesi tidak bisa dilepaskan dari pendekatan multidisipliner. Ketimpangan wilayah, integrasi sosial, dan pembangunan multikultural bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dalam ruang kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan antropologis yang memahami manusia sebagai pusat perubahan, pendekatan ekonomi yang adil, serta perencanaan wilayah maritim yang

partisipatif, Sulawesi memiliki peluang besar untuk tumbuh tanpa harus meninggalkan siapa pun di belakang.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan di Pulau Sulawesi bukan hanya soal angka dan pertumbuhan ekonomi, tapi tentang manusia dan kehidupan mereka sehari-hari. Ketimpangan yang masih terasa antarwilayah mencerminkan betapa belum meratanya kesempatan dan akses bagi semua orang, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan. Di sisi lain, kekayaan budaya dan keberagaman etnis di Sulawesi sesungguhnya bukan penghalang, melainkan potensi besar untuk membangun masa depan yang inklusif. Masyarakat Sulawesi telah lama hidup berdampingan dalam keragaman; tinggal bagaimana negara hadir lebih adil. Melalui pendekatan antropologis yang menghargai budaya, ekonomi yang berpihak pada rakyat, dan perencanaan wilayah maritim yang memperhatikan suara komunitas pesisir, pembangunan bisa menjadi lebih manusiawi. Kini saatnya bergerak bukan hanya cepat, tapi juga bersama—agar semua wilayah dan semua orang di Sulawesi merasakan arti dari kata “maju” dengan cara yang adil dan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Irawan, R. (2018). Pendidikan multikultural sebagai basis integrasi sosial di Sulawesi. *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 23(1), 27–38.
- Jinca, M. Y. (2020). Keterpaduan sistem jaringan wilayah maritim berbasis ruang dan budaya lokal. *Jurnal Masyarakat Maritim Indonesia*, 1(1), 1–12.
- Mujiburrahman, M. (2021). Ketimpangan wilayah dan strategi pembangunan kawasan tertinggal di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145–160.
- Wulandari, A., & Haryono, A. (2021). Pemerataan pembangunan dalam perspektif perencanaan wilayah: Studi kasus kawasan industri Morowali. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNIB*, 13(1), 27–38.
- Yuliana, S. (2020). Pengaruh identitas budaya terhadap konflik dan integrasi sosial di Sulawesi Selatan. *Jurnal Antropologi UGM*, 2(2), 1–15.